
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMERINTAH DAN INDUSTRI INDONESIA MELALUI TANTANGAN DAN PELUANG E-GOVERNMENT

Silfa Intan Sabila^a, Mery Anthonia Nasta Latu^b, Annisa Fitria Zahara^c, Bambang Sutedja^d

^aFakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia, Email: silfaintansabila@gmail.com

^bFakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia, Email: mery.nasta@gmail.com

^cFakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia, Email: annisafitriah11@gmail.com

^dFakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia, Email: bamted29@gmail.com

ArticleInfo

Article History:

Received : 30-11-2024

Revised : 29-12-2024

Accepted : 25-06-2025

Published : 30-11-2025

Keywords:

E-Government

Sustainable Development

Industry

Abstract

Electronic Government Development Index, is an index that measures the development of governance systems in various countries with three main dimensions: Online Services Index (OSI), Telecommunication Infrastructure Index (TII), and Human Resources Index (HCI). Published once every two years by the Program for Better Regulation (PBB) in an e-government survey report. EGDI provides rich information about the progress of e-government systems in dependent countries. The Indonesian government has taken various strategic policies to improve the e-government ranking in this country, the government has also published a Guide to Preparing an e-government Development Master Plan as a guide for developing a better e-government system. The Indonesian government ranking (PeGI) is carried out periodically to measure the performance and effectiveness of governments in various countries. The increase in the IEP score in Indonesia in 2023 from 64.76 in 2022 to 66.04 on a scale of 100, is proof that bureaucratic reform in Indonesia is on the right track. This increase places Indonesia in 73rd place out of 214 countries.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 01-01-2020

Direvisi : 29-12-2024

Disetujui : 25-06-2025

Diterbitkan : 30-11-2025

Kata Kunci:

Pemerintah

Pembangunan Berkelanjutan

Industri

Abstrak

Electronic Government Development Index, merupakan sebuah indeks yang mengukur pengembangan sistem *egovernment* di berbagai negara dengan tiga dimensi utama: Indeks Pelayanan Online (OSI), Indeks Infrastruktur Telekomunikasi (TII), dan Indeks Sumber Daya Manusia (HCI). Diterbitkan sekali dua tahun oleh Programme for Better Regulation (PBB) dalam laporan survei *e-government*. EGDI memberikan informasi yang kaya tentang kemajuan sistem e-government di negara-negara tergantung. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai kebijakan strategis untuk meningkatkan peringkat *e-government* di negara ini, pemerintah juga telah menerbitkan Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-government* sebagai panduan bagi pengembangan sistem *e-government* yang lebih baik. Peningkatan skor *egovernment* Indonesia (PeGI) dilakukan secara berkala untuk mengukur kinerja dan efektivitas pemerintah di berbagai negara. Peningkatan skor IEP di Indonesia pada tahun 2023 dari 64,76 pada tahun 2022 menjadi 66,04 skala 100, merupakan bukti reformasi birokrasi di Indonesia sudah di jalur yang tepat. Peningkatan ini menempatkan Indonesia di peringkat 73 dari 214 negara.

PENDAHULUAN

Pengembangan *E-government Development Index* (EGDI) merupakan upaya untuk mengukur peringkat pengembangan e-government di berbagai negara, termasuk Indonesia. EGDI dibuat oleh *Programme for Better Regulation* (PBB) dan diterbitkan setiap dua tahun. Indeks ini mengukur kinerja negara dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui tiga dimensi utama: indeks pelayanan online (OSI), indeks infrastruktur telekomunikasi (TII), dan indeks sumber daya manusia (HCI).¹

Pada *UN E-Government Survey 2020*, Indonesia memiliki skor EGDI sebesar 0.6612, yang menempatkannya dalam grup *High E-Government Development Index* (EGDI). Negaranegara dengan poin lebih dari 0.75 dianggap sebagai *Very High EGDI*, sementara yang memiliki poin 0.50 sampai 0.75 disebut High EGDI. Indonesia mencatatkan peningkatan peringkat yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, naik dari peringkat 107 di tahun 2018 dan 116 di tahun 2016 menjadi peringkat 88 di tahun 2020.

PBB, melalui Department of Economic and Social Affairs, juga melakukan penilaian terhadap implementasi *e-government* oleh negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Tujuan survei ini adalah untuk menjadi alat bantu pembangunan bagi negara-negara anggota PBB dalam mengidentifikasi kekuatan dan tantangan dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

EGDI merupakan alat penting dalam memetakan kemajuan sistem *e-government* di negara-negara tergantung, memberikan informasi yang kaya tentang perkembangan tersebut. Dengan menggunakan EGDI sebagai panduan, negara-negara dapat meningkatkan peringkat mereka dan menangani isu-isu yang mungkin muncul dalam pengembangan sistem e-government, sehingga membantu pencapaian tujuan pembangunan yang lebih baik.

Perkembangan *E-government Development Index* (EGDI) merupakan indikator penting dalam mengukur kemajuan sistem e-government di berbagai negara. Dalam konteks ini, perlu dianalisis bagaimana EGDI berkembang selama periode penguatan lima tahun pertama (2010-2014) serta apakah ada tren signifikan yang dapat diidentifikasi. Selain itu, penting juga untuk memahami penguatan EGDI pada lima tahun terakhir (2016-2020) dan

¹Nugroho, R. A. & Purbokusumo, Y. (2020). E-Government Readiness: Penilaian Kesiapan Aktor Utama Penerapan E-Government di Indonesia (E-Government Readiness: Main Actor Readiness Assessment for E-Government Application in Indonesia). IPTEKOM: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi. Volume 22 Nomor 1.

faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perkembangan *E-government Development Index* selama dua periode yaitu, lima tahun pertama penguatan (2010-2014) dan lima tahun terakhir (2016-2020). Dengan mempelajari trend ini, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor apa yang memengaruhi perubahan dalam EGDI serta bagaimana hal ini dapat memengaruhi kemajuan sistem *e-government* secara keseluruhan. Informasi ini akan memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan dan praktisi *e-government* untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi sistem *e-government* di negara-negara tersebut.

Di era digital ini, *e-government* telah menjadi alat penting bagi pemerintah dan industri di seluruh dunia untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Indonesia, sebagai negara dengan populasi internet terbesar keempat di dunia, memiliki peluang besar untuk memanfaatkan *e-government* untuk memajukan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menerapkan *e-government* dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya berbagai kebijakan dan strategi nasional, seperti

Roadmap e-government Indonesia 2020-2024. Namun, implementasi *e-government* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti :

- 1) Kesenjangan infrastruktur : akses internet yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah pedesaan, menjadi hambatan utama dalam implementasi *e-government*.
- 2) Kurangnya literasi digital : banyak masyarakat Indonesia yang masih belum memiliki literasi digital yang memadai untuk menggunakan *e-government*.
- 3) Keamanan siber : ancaman keamanan siber menjadi semakin besar seiring dengan meningkatnya penggunaan internet. Hal ini perlu diwaspadai dalam implementasi *e-government* agar data dan informasi pemerintah dan masyarakat aman.
- 4) Ketersediaan sumber daya ; implementasi *e-government* membutuhkan sumber daya yang besar, baik dari segi finansial maupun sumber daya manusia. ²

Meskipun terdapat berbagai tantangan, *e-government* juga menawarkan banyak peluang bagi pemerintah dan industri Indonesia, antara lain :

²Nufus, S. (2024). Memanifestasikan Good Governance dengan Reformasi Birokrasi di Indonesia. RECHTSVACUUM: Journal of Legal Studies. Volume 1 Nomor 1.

- 1) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik
- 2) *E-government* dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dengan mengotomatisasi proses bisnis dan mengurangi birokrasi.
- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- 4) *E-government* dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dengan menyediakan akses informasi yang mudah bagi masyarakat.
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat
- 6) *E-government* dapat meningkatkan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah melalui platform online.
- 7) Mendorong pertumbuhan ekonomi

Dengan menciptakan peluang baru bagi bisnis dan meningkatkan daya saing industri.

Untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang *e-government*, diperlukan upaya kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri, akademisi dan masyarakat. Dengan kerjasama yang baik, *e-government* dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan efektivitas pemerintah dan industri Indonesia, serta mewujudkan *good governance* dan masyarakat yang sejahtera.

Implementasi *e-government* di Indonesia meskipun menunjukkan kemajuan signifikan, masih menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat pencapaian keberhasilan maksimal. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah ketimpangan akses terhadap infrastruktur teknologi, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Akses internet yang belum merata mengakibatkan sebagian besar masyarakat kesulitan mengakses layanan *e-government* secara optimal. Meskipun kota besar seperti Jakarta dan Surabaya memiliki infrastruktur internet yang memadai, banyak daerah lainnya masih terhambat oleh keterbatasan jaringan dan teknologi. Selain itu, kurangnya literasi digital juga menjadi tantangan besar. Banyak masyarakat yang belum memahami cara memanfaatkan teknologi digital secara efektif, yang menghalangi mereka untuk mengakses dan menggunakan layanan *e-government*. Selain itu, isu terkait keamanan dan privasi data semakin penting seiring dengan berkembangnya penggunaan *e-government*. Perlindungan terhadap data sensitif menjadi hal yang krusial untuk menjaga kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam sistem ini. Oleh karena itu, meskipun ada kemajuan yang

signifikan, ketiga permasalahan ini masih memerlukan perhatian khusus untuk mencapai implementasi e-government yang efektif di Indonesia.

Sebagai bahan perbandingan, artikel lain yang berjudul "Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi E-Government di Indonesia" juga membahas isu-isu serupa terkait pengembangan e-government di Indonesia. Artikel tersebut menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, serta menjelaskan bagaimana e-government dapat memperpendek jalur pengambilan keputusan dan meningkatkan partisipasi publik. Namun, artikel ini juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi, seperti penerapan e-government yang belum optimal, serta kurangnya pemahaman yang mendalam tentang konsep e-government di kalangan pemerintah dan masyarakat. Sebagai contoh, banyak lembaga pemerintah yang masih melihat e-government sebagai proyek teknis semata, bukan sebagai bagian dari sistem manajemen pemerintahan yang komprehensif. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan dalam infrastruktur dan literasi digital, yang serupa dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Meskipun ada kemajuan dalam beberapa aspek, artikel ini menunjukkan bahwa implementasi e-government masih memerlukan upaya yang lebih besar agar dapat terwujud secara ideal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam pengembangan e-government, tantangan-tantangan yang dihadapi, seperti ketimpangan infrastruktur, kurangnya literasi digital, serta isu-isu keamanan dan privasi, masih memerlukan perhatian serius. Pemahaman yang lebih mendalam tentang perkembangan dan permasalahan ini sangat penting untuk mengoptimalkan implementasi e-government di Indonesia, sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan inklusif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menganalisis data E-Government Development Index (EGDI) Indonesia dari UN E-Government Survey 2020. Data EGDI yang diperoleh untuk periode 2016-2020 dianalisis untuk mengidentifikasi tren dan perubahan skor Indonesia dalam tiga dimensi utama: pelayanan online (OSI), infrastruktur telekomunikasi (TII), dan sumber daya manusia (HCI). Penelitian ini juga

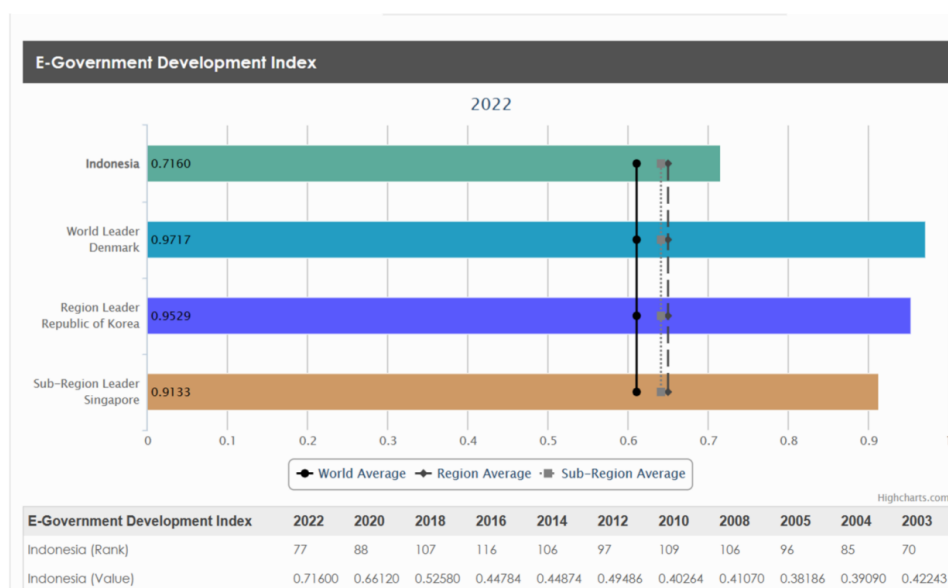
membandingkan skor EGDI Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki skor serupa untuk memberikan perspektif mengenai posisi Indonesia di tingkat regional dan global. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan e-government Indonesia serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1

Perkembangan *E-Government Development Index* di Indonesia Selama Beberapa Tahun Terakhir

E-government development index (EGDI) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur peringkat pengembangan *e-government* di berbagai negara, termasuk Indonesia. Indikator yang digunakan dalam *Online Service Index* (OSI) *E-Government Development Index* (EGDI) meliputi tiga dimensi kunci. Pertama, "*Scope and quality of online services*" mengukur tingkat dan kualitas layanan online yang tersedia di suatu negara. Kedua, "*Status of the development of telecommunication infrastructure*" mengevaluasi kondisi infrastruktur telekomunikasi yang, jika berkualitas dan meluas, akan memiliki dampak besar dalam perkembangan *e-government*. Terakhir, "*Inherent human capital*" menilai kemampuan warga negara dalam memanfaatkan layanan *e-government*, yang tergantung pada pendidikan, keterampilan, dan minat mereka dalam teknologi informasi dan komunikasi (ICT).

Berikut data *e-government development index* Negara Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.



Sumber: publicadministration.un.org

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa *e-government development index* Indonesia mengalami peningkatan pada beberapa tahun terakhir, khususnya berdasarkan data pada 4 (empat) tahun terakhir. Pada tahun 2016 Indonesia berada di peringkat 116, kemudian meningkat pada tahun 2018 di peringkat 107, selanjutnya kembali meningkat di tahun 2020 pada peringkat 88, dan data terakhir meningkat di peringkat 77 pada tahun 2022.

Studi yang dilakukan oleh Sukarno dan Nurmandi pada tahun 2023 menunjukkan keberhasilan Malaysia dalam meningkatkan EGDI melalui program literasi digital yang berskala nasional. Malaysia mengintegrasikan literasi digital dalam sistem pendidikan dan pelatihan komunitas, memungkinkan masyarakat di wilayah pedesaan sekalipun untuk memahami dan memanfaatkan layanan digital pemerintah. Langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia, yang masih menghadapi tantangan rendahnya literasi digital di beberapa daerah terpencil.

Selain itu, Adams dan Paul pada tahun 2023 mengidentifikasi tantangan implementasi *e-government* di negara-negara Afrika, khususnya terkait stabilitas politik dan keamanan siber. Mereka menekankan bahwa keamanan siber yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan *e-government*. Indonesia menghadapi situasi serupa, di mana ancaman peretasan dan kurangnya regulasi yang tegas sering menjadi hambatan dalam pengembangan sistem *e-government* yang terintegrasi.

Studi lain oleh Yuliantini dan Nurmandi pada tahun 2023 membahas keberhasilan Thailand dalam mempercepat pengembangan *e-government* melalui kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Dengan melibatkan sektor swasta, Thailand mampu membangun infrastruktur telekomunikasi yang lebih luas dan berkualitas. Ini memudahkan akses masyarakat terhadap layanan online sekaligus mendorong inovasi di sektor publik.

Dengan belajar dari negara-negara tersebut, Indonesia dapat memperkuat implementasi *e-government* melalui tiga langkah strategis: pertama, meningkatkan literasi digital dengan program edukasi berskala nasional; kedua, memperkuat keamanan siber melalui regulasi yang lebih ketat; dan ketiga, memperluas kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk pembangunan infrastruktur. Langkah-langkah ini tidak hanya relevan untuk memperbaiki peringkat EGDI, tetapi juga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan partisipatif.

Survei yang dipublikasikan setiap dua tahun ini, memeringkatkan 193 negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dari tiga dimensi ukuran kinerja, yang tergabung dalam *E-Government Development Index* (EDGI) tersebut, antara lain indeks pelayanan online atau online service index (OSI), indeks infrastruktur telekomunikasi atau *telecommunication infrastructure index* (TII), dan indeks sumber daya manusia atau *human capital index* (HCI).

Survei PBB kali ini mengusung tema “*The Future of Digital Government*”. Tujuan dari survei ini adalah sebagai alat bantu pembangunan bagi negara-negara anggota PBB untuk mengidentifikasi kekuatan dan tantangan masing-masing dalam upaya mempertajam implementasi kebijakan dan strategi pengembangan penerapan SPBE. Untuk tujuan survei, PBB mempredikatkan negara-negara yang mendapatkan poin lebih dari 0.75 sebagai *Very High E-Government Development Index* atau *Very High* EGDI, antara 0.50 sampai 0.75 sebagai *High* EGDI, antara 0.25 sampai 0.50 sebagai *Middle* EGDI, dan kurang dari 0.25 sebagai *Low* EGDI. Secara keseluruhan, Indonesia mencetak skor 0.71600 di dalam grup *High* EGDI di *United Nations E-Government Survey 2022*.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penguatan Indonesia dalam EGDI termasuk peningkatan ketersediaan pelayanan online.³ Indonesia telah mengembangkan lebih banyak dan lebih baik layanan *online*, mempermudah akses warga negara terhadap informasi dan layanan pemerintah. Selain itu, pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang lebih luas dan berkualitas juga menjadi faktor penting, yang memudahkan akses internet dan layanan *online* bagi warga negara.

Terdapat beberapa hal yang menjadi latar belakang berkembangnya *e-government development index* di Indonesia, yaitu diantaranya:

1. Perkembangan era globalisasi, dimana segala sesuatunya dapat dengan mudah diinformasikan dan diketahui secara global, bukan hanya sebatas satu wilayah atau satu negara saja, tetapi sudah menyeluruh secara global.

³ Yuliantini, L. S., & Nurmandi, A. (2023). The Impact of the E-Government Development Index (EGDI) on the Worldwide Governance Indicator (WGI) in European Union, Countries. *Policy & Governance Review*, 7(2), 140-153.

2. Perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), dimana seiring berkembangnya zaman, manusia juga semakin meningkat pengetahuannya, terlebih didukung pula dengan perkembangan teknologi
3. Perkembangan kualitas hidup masyarakat, yang mana peningkatan kualitas hidup ini juga berkaitan dengan perkembangan dalam sektor industri dan ekonomi

Keberadaan *e-government development index* di Indonesia, juga membantu pemerintah dalam mewujudkan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, dengan mengutamakan peningkatan pelayanan publik. Pelayanan publik ini dapat meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

E-government development index hadir untuk membantu meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, yang mana diharapkan dengan memanfaatkan teknologi tersebut, akan membantu efektivitas dan efisiensi layanan publik.

Berkaitan dengan sektor industri, Revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0* telah mendorong pemerintah untuk memanfaatkan teknologi meningkatkan pelayanan publik dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Tentunya, dampak dan keberadaan Revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0* tidak dapat dihindari. Maka dari itu, pemerintah harus mengembangkan teknologi digital untuk beradaptasi dan mengambil kesempatan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Pentingnya *e-government* telah mendorong pemerintah untuk mencoba menerapkan prinsip-prinsip *e-government* dalam pelayanan pemerintahan.

Dalam mendukung perkembangan *e-government*, diperlukan sumber daya manusia yang cerdas dan cakap dalam mengelola teknologi. Jika melihat perkembangan selama beberapa waktu terakhir, tentu saat ini semakin banyak sumber daya manusia yang cakap menggunakan teknologi. Contohnya dalam mengoperasikan *gadget*, *web*, atau berbagai aplikasi digital lainnya. Bukan hanya sekedar orang dewasa atau para pihak tertentu saja yang dapat mengakses dan mengoperasikannya, melainkan para kaum muda, bahkan anak-anak pun sudah semakin memahami perkembangan teknologi di era digital ini.

Namun pada kenyataannya, tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada sumber daya manusia yang minim dalam pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, kurangnya

integrasi data juga dapat menjadi hambatan bagi sejumlah pihak, karena banyaknya aplikasi dan layanan yang disediakan, justru dapat mempersulit masyarakat.

Maka dari itu, walaupun perkembangan *e-government development index* Indonesia selama beberapa tahun terakhir telah menunjukkan adanya peningkatan, namun bukan berarti pemerintah dan masyarakat cukup puas akan hasil tersebut. Akan tetapi perlu adanya sinergi yang baik antara masyarakat dan pemerintah untuk terus meningkatkan *e-government development indeks* Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas akses masyarakat, menciptakan masyarakat yang cakap akan teknologi, serta meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2

Birokrasi di Dunia, dan Pengaruhnya Bagi Indonesia, Serta Upaya Reformasi Birokrasi

Pengaruh Indeks-indeks Dunia terhadap Birokrasi di Indonesia Indeks Efektivitas Pemerintah (IEP) adalah salah satu indeks dunia yang digunakan untuk mengukur kinerja dan efektivitas pemerintahan di berbagai negara. Peningkatan skor IEP di Indonesia pada tahun 2023 dari 64,76 pada 2022 menjadi 66,04 skala 100, merupakan bukti reformasi birokrasi di Indonesia sudah di jalur yang tepat. Peningkatan ini menempatkan Indonesia di peringkat 73 dari 214 negara. 9 Indeks Efektivitas Pemerintah mengukur parameter efektivitas, termasuk kualitas layanan publik, derajat independensi birokrasi terhadap intervensi politik, kualitas formulasi kebijakan, dan kredibilitas pemerintah.

Peningkatan skor IEP di Indonesia berarti bahwa reformasi birokrasi di Indonesia sudah memiliki efek positif dan harus dilanjutkan dengan tetap, masif, dan serentak di semua level pemerintah, baik pusat maupun daerah.⁴ Reformasi birokrasi di Indonesia telah membawa hasil, seperti penyederhanaan proses bisnis dan digitalisasi pelayanan. Kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan, seperti Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik dan penyederhanaan perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS), telah membantu memudahkan proses perizinan dan mempercepat pelayanan. Indeks Efektivitas Pemerintah (IEP) mempengaruhi birokrasi di Indonesia melalui berbagai parameter yang ditangkap oleh indeks. Beberapa parameter yang mengukur efektivitas pemerintah antara lain:

⁴ Adams, S. O., & Paul, C. (2023). E-government development indices and the attainment of United Nations sustainable development goals in Africa: A cross-sectional data analysis. *European Journal of Sustainable Development Research*, 7(4).

- 1) Kualitas layanan publik: IEP mengukur kualitas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah, yang mempengaruhi birokrasi di Indonesia. Sistem pemerintahan yang efektif dan layanan publik yang baik akan mempermudah proses birokrasi
- 2) Derajat independensi birokrasi terhadap intervensi politik: IEP mengukur derajat independensi birokrasi terhadap intervensi politik, yang mempengaruhi birokrasi di Indonesia. Birokrasi yang lebih independen dan terpisah dari politik akan mempermudah proses birokrasi
- 3) Kualitas formulasi kebijakan: IEP mengukur kualitas formulasi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, yang mempengaruhi birokrasi di Indonesia. Kebijakan yang efektif dan terstruktur akan mempermudah proses birokrasi
- 4) Kredibilitas pemerintah: IEP mengukur kredibilitas pemerintah, yang mempengaruhi birokrasi di Indonesia. Pemerintah yang memiliki kredibilitas tinggi akan mempermudah proses birokrasi.⁵

Peningkatan skor IEP di Indonesia pada tahun 2023 dari 64,76 pada 2022 menjadi 66,04 skala 100, merupakan bukti reformasi birokrasi di Indonesia sudah di jalur yang tepat. Peningkatan skor ini menempatkan Indonesia di peringkat 73 dari 214 negara. Peningkatan ini disebabkan oleh berbagai kebijakan yang dijalankan, seperti Sistem 10 Pemerintahan berbasis Elektronik dan penyederhanaan perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS), yang mempermudah proses perizinan dan mempercepat pelayanan.

Di dunia, diharapkan birokrasi harus direformasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, perubahan mindset dan culture set, birokrasi lebih sederhana, adaptif dan inovatif, serta mampu bekerja efektif dan efisien.

Reformasi birokrasi di Indonesia diharapkan untuk menciptakan profil birokrasi yang diinginkan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mengubah pola pikir dan budaya kerja.

Tujuan reformasi birokrasi di Indonesia adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima. Reformasi birokrasi di Indonesia meliputi beberapa area, seperti manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan

⁵Haning, M. T. (2018). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik. Volume 4 Nomor 1.

tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penataan pengawasan, dan akuntabilitas kinerja.

Reformasi birokrasi di Indonesia juga diharapkan untuk mengembalikan citra birokrasi melalui gerakan reformasi birokrasi atau dalam peristilahan lain disebut dengan reformasi administrasi publik/pemerintahan.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam reformasi birokrasi di Indonesia antara lain, dihapuskan monoloyalitas birokrasi pada salah satu partai tertentu, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Reformasi birokrasi di Indonesia diharapkan untuk menciptakan profil birokrasi yang diinginkan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mengubah pola pikir dan budaya kerja. Perubahan yang diharapkan dari reformasi birokrasi antara lain:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- 2) Memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
- 3) Mengubah pola pikir dan budaya kerja
- 4) Memperbaiki struktur dan organisasi birokrasi
- 5) Mengubah perilaku administrasi birokrasi
- 6) Meningkatkan ketatalaksanaan
- 7) Membangun kembali citra birokrasi

Reformasi birokrasi di Indonesia juga diharapkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima.⁶ Reformasi birokrasi di Indonesia telah dikaitkan dengan ribuan proses dan fungsi pemerintahan yang tumpang tindih, melibatkan banyak pegawai, dan memerlukan anggaran yang besar. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, banyak lembaga pemerintah yang terkendala oleh ketidakefektifan dan inefisiensi, serta maraknya duplikasi fungsi pada lembaga-lembaga yang ada.⁷

⁶ Sukarno, M., & Nurmandi, A. (2023). E-Government Development Index Impact on World Governance Indicator Index in Southeast Asian Countries. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 4(1), 97114.

⁷ antaranews.com. (2020). Tjahjo: Peleburan lembaga ke kementerian untuk mengurangi tumpang tindih. ⁵ Transparansi Internasional. (2020). Tanpa judul. <https://mercusuar.uzone.id/>

Pemerintah sejauh ini telah membubarkan banyak lembaga yang dianggap menjalankan fungsi yang tumpang tindih. Akibatnya, pada tahun 2014 sebanyak 10 lembaga dibubarkan, disusul oleh dua instansi pada tahun 2015 dan 9 instansi pada tahun 2016. Pada tahun 2017 dibubarkan 2 instansi, disusul 14 instansi pada tahun 2020.⁵ Selain itu, reformasi birokrasi juga memerlukan restrukturisasi sistem dan proses birokrasi di seluruh tingkatan yang bertujuan untuk mengurangi birokrasi, mengubah paradigma dari sekedar mengikuti rutinitas menjadi mengambil inisiatif yang krusial bagi praktik dan pelayanan yang inovatif. Oleh karena itu, reformasi birokrasi memerlukan revisi dan pengembangan berbagai peraturan, pembaharuan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta penyesuaian tugas dan fungsi lembaga pemerintah. Pada tahun 2014, reformasi yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan pencapaian sebagai berikut:

- a. tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. peningkatan kualitas pelayanan publik;
- c. peningkatan kinerja, akuntabilitas, dan kapasitas aparatur sipil negara;
- d. peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara yang didukung oleh sistem rekrutmen berbasis prestasi dan berbasis kompetensi dan transparan, promosi, dan peningkatan mobilitas aparatur sipil negara antar daerah, antar pusat, dan antar pusat dalam daerah, serta memperoleh gaji yang sepadan dan sosial yang layak. keamanan.⁸

Sementara itu, pada tahun 2019, dorongan reformasi birokrasi mencakup perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme; meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik hingga mencapai tingkat yang sepadan dengan harapan masyarakat . Selain itu, reformasi birokrasi diharapkan dapat meningkatkan daya saing negara melalui peningkatan kapasitas, akuntabilitas dan kinerja birokrasi pemerintah, peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara, dibangun di atas pola pikir dan budaya baru yang menjunjung tinggi integritas dan integritas. Kinerja Luar Biasa.

Berdasarkan hasil penghitungan frekuensi penggunaan frasa “tata kelola yang baik” dalam Peraturan Presiden No.81/2010”. Frasa tersebut disebutkan tiga belas kali dalam dokumen . Pertama, rancangan besar ini mempertimbangkan tata kelola yang baik sebagai

⁸ Sobat, LA (2014). Pendahuluan: OECD dan Transfer Kebijakan: Studi Kasus Komparatif. Jurnal Analisis Kebijakan Komparatif: Penelitian dan Praktik

elemen kunci untuk mencapai penyediaan layanan publik yang lebih baik. Pemerintah menyadari pentingnya mengadopsi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan tata pemerintahan yang baik untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Sepuluh dari tiga belas kali frasa tersebut digunakan menyebutkan *good governance* sebagai tujuan reformasi birokrasi. Misalnya saja, salah satu kalimat menyatakan bahwa “untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan reformasi birokrasi” (Peraturan Presiden 81/2010, halaman iii).

Lebih lanjut, dokumen tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa “Grand Design Birokrasi Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”. Dengan demikian, *good governance* dalam konteks ini dipersepsikan sebagai tujuan utama reformasi birokrasi. Namun tata kelola yang baik dalam dokumen tersebut juga dianggap sebagai dasar penerapan tata kelola . Dokumen tersebut menyatakan bahwa sistem, proses dan prosedur kerja harus efektif, jelas, terukur, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.⁹

KESIMPULAN

Indonesia telah mencatatkan kemajuan signifikan dalam *E-Government Development Index* (EGDI), namun tantangan seperti kesenjangan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan ancaman keamanan siber tetap menjadi hambatan utama dalam pengembangan *e-government*. Perbandingan dengan negara-negara seperti Malaysia, Thailand, dan beberapa negara di Afrika menunjukkan bahwa keberhasilan dalam meningkatkan EGDI sangat dipengaruhi oleh penguatan literasi digital, kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta kebijakan yang memperkuat keamanan siber. Oleh karena itu, untuk mempercepat transformasi digital dan meningkatkan tata kelola pemerintahan, Indonesia perlu mengadopsi langkah-langkah serupa yang telah berhasil diterapkan di negara-negara tersebut, seperti peningkatan akses layanan, program edukasi digital, dan regulasi yang lebih ketat terkait keamanan data.

⁹ Ishak, N., Hasibuan, RR, & Arbani, TS (2020). Kolaborasi Birokrasi dan Politik Menuju Sistem Tata Kelola yang Baik. *Bestuur*, 8(1), 19.<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42922>

Refomasi Birokrasi terhadap birokrasi di dunia akan terjadi karena beberapa faktor. Pertama, perkembangan situasi nasional dan global, seperti Covid-19 dan tatanan baru, memerlukan birokrasi yang lebih dinamis, gesit, profesional, efektif, dan efisien. Kedua, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan akan mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional, terakhir perubahan lingkungan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan memerlukan sistem penyelenggaraan yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi diperlukan untuk mempercepat proses pengelolaan, mengurangi proses yang tidak diperlukan, dan mengubah mindset dan kultur birokrasi. Reformasi birokrasi juga memerlukan pengembangan sistem manajemen dan pengawasan, akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik. Indonesia telah memulai reformasi birokrasi sejak 2010 dengan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang disusun dalam tiga periode road map. Pada tahap akhirnya, diharapkan reformasi birokrasi menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia.

REFERENSI

- Adams, S. O., & Paul, C. (2023). E-government development indices and the attainment of United Nations sustainable development goals in Africa: A cross-sectional data analysis. *European Journal of Sustainable Development Research*, 7(4).
- Haning, M. T. (2018). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Volume 4 Nomor 1.
- Ishak, N., Hasibuan, RR, & Arbani, TS (2020). Kolaborasi Birokrasi dan Politik Menuju Sistem Tata Kelola yang Baik. *Bestuur*, 8(1), 19
- Nufus, S. (2024). Memanifestasikan Good Governance dengan Reformasi Birokrasi di Indonesia. *RECHTSVACUUM: Journal of Legal Studies*. Volume 1 Nomor 1.
- Nugroho, R. A. & Purbokusumo, Y. (2020). E-Government Readiness: Penilaian Kesiapan Aktor Utama Penerapan E-Government di Indonesia (E-Government Readiness: Main Actor Readiness Assessment for E-Government Application in Indonesia). *IPTEKOM: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi*. Volume 22 Nomor 1.
- Sobat, LA (2014). Pendahuluan: OECD dan Transfer Kebijakan: Studi Kasus Komparatif. *Jurnal Analisis Kebijakan Komparatif: Penelitian dan Praktik*

- Sukarno, M., & Nurmandi, A. (2023). E-Government Development Index Impact on World Governance Indicator Index in Southeast Asian Countries. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 4(1), 97114.
- Yuliantini, L. S., & Nurmandi, A. (2023). The Impact of the E-Government Development Index (EGDI) on the Worldwide Governance Indicator (WGI) in European Union, Countries. *Policy & Governance Review*, 7(2), 140-153.